KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR: Impor Beras Jadi Bukti Manajemen Pangan Lemah
Tanggal : Minggu, 29 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR: Impor Beras Jadi Bukti Manajemen Pangan Lemah

DPR menganggap keputusan Pemerintah mengimpor beras bukti masih lemahnya manajemen pangan.

Impor memang harus dilakukan untuk mengantisipasi dampak buruk El Nino. Tapi, mestinya kondisi seperti ini bisa diantisipasi karena Pemerintah memiliki program pangan.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengatakan, janji Pemerintah untuk berswasembada masih jauh terwujud.

"Jangankan swasembada pangan, untuk makanan pokok mayoritas rakyat saja, kita impor besar-besaran. Jika dijumlahkan, tahun ini impor beras mencapai 3,5 juta ton beras. Itu belum termasuk 1 juta ton komitmen impor dari China," kata Amin, Sabtu (28/10/2023).

Amin menjelaskan, dari sudut pandang konsumsi, impor memang diperlukan mengingat adanya dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah. El Nino merupakan fenomena alam yang bisa diprediksi, sehingga semestinya bisa diantisipasi.

"Buat apa kita punya lembaga riset mentereng seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) jika persoalan ini (prediksi, antisipasi dan perencanaan) saja tidak bisa dilakukan," imbuhnya.

Apalagi Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, ada penambahan luas tanam 500 ribu hektare yang diperkirakan bisa menambal kebutuhan di musim paceklik pada 3 bulan awal tahun 2024.

"Jangan-jangan klaim tersebut hanya pepesan kosong," kritik Amin.

Selain itu, Bulog juga mengklaim masih ada stok 1,48 juta ton hingga akhir tahun ini. Dengan jumlah stok aman 1,2 juta ton, jika untuk menambal kekurangan pasokan 3 bulan awal di 2024, mengapa harus impor besar-besaran.

"Padahal mulai Maret hingga Mei diperkirakan bakal terjadi panen raya," ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengatakan, impor dibutuhkan untuk memenuhi stok dalam negeri.

Saat ini Pemerintah memang akan melakukan impor sebesar 1 juta ton beras, setelah sebelumnya sudah melakukan impor 2 juta ton.

"Dari hitung-hitungan di lapangan memang dibutuhkan 1 juta ton untuk mengamankan stok beras sampai dengan Pemilu 2024," kata Firman.

Anggota Komisi IV DPR Ema Umiyyatul Chusnah mengatakan, kebijakan impor beras dianggap tak memiliki efek menurunkan harga beras di dalam negeri.

Ema bilang, kenaikan harga terjadi pada sejumlah pangan, antara lain beras. Harga beras premium mengalami kenaikan mencapai Rp 14.400 per kg.

"Impor beras belum mampu mengatasi masalah, baik harga maupun ketersediaan beras di dalam negeri. Kami meminta Pemerintah memiliki strategi kebijakan jangka panjang terkait masalah itu," pintanya.

Sementara, harga beras diprediksi akan terus meningkat karena tambahan stok beras yang tidak seperti biasanya. Sedangkan permintaan beras diprediksi akan tetap stabil, bahkan diperkirakan meningkat di akhir tahun.

Belum lagi perubahan iklim yang memicu kekeringan yang membuat produksi padi berkurang.

Ema mengatakan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan anggaran tambahan pangan untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, bukan untuk impor pangan. ■ DIR